

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Setiap wilayah akan selalu berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Perkembangan wilayah yang tidak terkendali, dalam jangka panjang akan menimbulkan berbagai masalah. Masalah yang timbul antara lain kesenjangan perkembangan wilayah yang tinggi, tidak optimumnya distribusi investasi, maupun ketidakmerataan pengembangan infrastruktur wilayah. Untuk itu diperlukan perangkat untuk mengarahkan perkembangan pembangunan dalam bentuk rencana tata ruang wilayah. Rencana Tata Ruang Wilayah pada dasarnya merupakan arahan kebijakan pembangunan daerah berwawasan tata ruang wilayah yang digunakan untuk pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang. Berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat harus mengacu pada arahan pemanfaatan ruang, sehingga ruang yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimum (Supriyadi, 2013).

Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Prinsip dasar pemberian otonomi dimaksud berdasarkan atas pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Atas dasar perimbangan ini, maka pemberian otonomi diharapkan pada akhirnya akan lebih memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Supriyadi, 2013).

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan harkat, martabat, kualitas, serta kesejahteraan segenap lapisan masyarakat. Dalam kerangka itu pembangunan harus dipandang sebagai suatu rangkaian proses pertumbuhan yang terus menerus dan secara berkesinambungan untuk mewujudkan tujuan-tujuannya. Pembangunan daerah yang

dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, mandiri dan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan daerah lain yang lebih maju dan sekaligus secara agregat meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara secara adil dan merata. Pemberian otonomi kepada daerah akan menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan peran nyata dan kemandirian daerah dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata (Tjokroaminoto & Mustopadidjaya, 1985)

Analisis fungsi wilayah, atau sering disebut juga dengan analisis fungsi, adalah analisis terhadap fungsi-fungsi pelayanan yang tersebar di daerah perencanaan, dalam kaitannya dengan berbagai aktivitas penduduk/masyarakat, untuk memperoleh/memanfaatkan fasilitas-fasilitas pelayanan tersebut, dengan menggunakan slat analisis fungsi akan diketahui tingkat keseimbangan antara pusat-pusat pelayanan yang ada dengan distribusi penduduk di suatu daerah, sehingga akan diketahui penumpukan fasilitas pelayanan di wilayah-wilayah tertentu atau sudah tersebar secara merata, apakah fasilitas yang ada sudah sesuai dengan fungsinya atau belum. Fungsi di sini adalah berupa pelayanan yang dapat diberikan oleh fasilitas-fasilitas umum, baik milik pemerintah maupun swasta kepada masyarakat luas selaku pelanggan (customer).

Dalam melaksanakan analisis fungsi, perencanaan hendaknya tidak terfokus pada keadaan suatu obyek secara fisik saja, melainkan harus benar-benar dilihat dan dianalisis pemanfaatannya, apakah dapat berfungsi atau tidak. Jika masih berfungsi, apakah sesuai untuk peruntukannya atau telah berubah fungsi. Hal-hal inilah yang perlu diperhatikan dalam analisis fungsi, sehingga suatu wilayah pemukiman, yakni kekuatan yang menyangkut fasilitas pelayanan yang dimilikinya. Berbeda dengan analisis demografis (kependudukan), yang memberikan tambahan wawasan kepada perencana mengenai kecenderungan pembangunan pola-pola pemukiman yang dilihat berdasarkan data-data penduduk (yang sangat sedikit bahkan kurang memberikan informasi tentang kondisi sosial ekonomi) analisis fungsi

memberikan pandangan yang lebih terfokus pada masalah-masalah fasilitas pelayanan yang ada, sebagai suatu kekuatan mendasar yang terkait dengan masalah sosial ekonomi, khususnya ekonomi aglomerasi (penumpukan).

Ekonomi aglomerasi memiliki peran penting dalam pembangunan, banyaknya pelayanan dan konsentrasi kegiatan ekonomi merangsang informasi dan pertukaran. Spesialisasi ekonomi meningkatkan efisiensi dan pendapatan. Akses yang baik terhadap pasar, sistem keuangan dan pasar tenaga kerja yang lebih luas, mengurangi biaya produksi dan meningkatkan pendapatan serta akhirnya terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat (Jenssen, 1998).

Kabupaten Bangkalan sebagai wilayah yang berada di Propinsi Jawa Timur masih termasuk dalam kategori daerah yang tertinggal dibandingkan dengan wilayah yang ada kawasan Gerbangkertasusila. Sampai saat ini perekonomian Kabupaten Bangkalan di dominasi oleh sektor primer yang berbasis pada sumber daya alam, yaitu pertanian. Hal ini dapat dilihat dari distribusi prosentase PDRB tahun 2013 menunjukkan bahwa sektor pertanian memperoleh nilai tertinggi sebesar 31,62%, kemudian diikuti oleh sektor perdagangan hotel dan restoran sebesar 29,09%. Sedangkan 7 (tujuh) sektor lainnya memberikan distribusi prosentase yang relatif kecil antara 0,77 – 13,84% (Bangkalan Dalam Angka 2014).

Besarnya distribusi sektor primer terhadap perekonomian Kabupaten Bangkalan disebabkan oleh besarnya nilai tambah yang diperoleh dari produk-produk yang berbasis pada sumber daya alam (*Resource Base Oriented*), meskipun pada kenyataannya sumberdaya lahan yang ada relatif kurang subur. Secara geografis Kabupaten Bangkalan memiliki keunggulan komparatif dibandingkan wilayah lain di Madura, hal ini dikarenakan letaknya berdekatan dengan Kota Surabaya yang notabene merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur. Keunggulan yang dimiliki ditunjang dengan dibentuknya kalster pengembangan Jawa Timur yang diwujudkan dalam kawasan Gerbang kertasusila yaitu Gresik, Bangkalan, Mojokerto,

Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Inti dari konsep kawasan itu adalah pembangunan di sektor pertanian, industri, pertambangan, perhubungan, dan pariwisata.

Wilayah Kabupaten Bangkalan secara administratif terbagi menjadi 18 kecamatan, dimana 8 diantara telah diarahkan untuk pengembangan kawasan industri dan jasa. Kawasan industri akan difokuskan pada wilayah Kecamatan Labang, Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Tragah, Kecamatan Burneh, Kecamatan Kamal, Kecamatan Socah. Sedangkan kawasan jasa akan banyak difokuskan pada wilayah Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Socah (pelabuhan dan pergudangan), Kecamatan Tanjung Bumi (pelabuhan). Keberadaan kawasan tersebut diharapkan mampu memberikan *multiplayer effect* terhadap kecamatan di sekitarnya, sehingga nantinya meningkatkan perekonomian di Kabupaten Bangkalan.

Dalam proses Perencanaan Daerah, analisis fungsi merupakan suatu alat yang efektif untuk melihat kerangka-kerangka umum seperti tersebut di atas, dan secara efektif dapat digunakan untuk melihat kegiatan ekonomi masyarakat yang dikonsentrasikan main suatu area tertentu pada lingkungan wilayah pembangunan, sehingga memudahkan para perencana untuk menentukan prioritas-prioritas yang mendorong masyarakat untuk memperoleh fasilitas pelayanan secara mudah

1.2. Perumusan Masalah

Telah banyak upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah di wilayah Kecamatan tiap-tiap oleh para stakeholder, namun ternyata belum dapat memberikan hasil yang optimal. Dengan kata lain kondisi Kecamatan yang ada di setiap daerah tersebut pembangunannya tetap termarginalkan. Berdasarkan hal tersebut rumusan permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana keragaan relatif tingkat perkembangan Kecamatan yang satu dibandingkan dengan Kecamatan yang lainnya di Kabupaten Bangkalan?

2. Bagaimana karakteristik dari masing-masing cluster perkembangan Kecamatan?

1.3. Tujuan

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui keragaan relatif tingkat perkembangan Kecamatan yang satu dibandingkan dengan Kecamatan yang lainnya di Kabupaten Bangkalan.
2. Mengetahui karakteristik dari masing-masing perkembangan Kecamatan.

1.4. Manfaat Penelitian

Sebagai suatu kajian analisis pengembangan wilayah, secara akademik penelitian ini kiranya dapat bermanfaat sebagai informasi awal untuk penelitian lebih lanjut tentang berbagai potensi dan arah pengembangan kecamatan dalam suatu daerah Provinsi Jawa timur umumnya dan Kabupaten Bangkalan khususnya. Dengan kata lain, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi salah satu aspek pengembangan potensi di daerah Kabupaten Bangkalan, yang sampai sekarang ini belum banyak diketahui dan dikaji. Pada gilirannya, penelitian ini kiranya memberikan manfaat bagi penentu kebijakan untuk mengelola dan memberdayakan potensi yang ada di masing-masing kecamatan Kabupaten Bangkalan.